

ABSTRAKSI

Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama TKI yang akan bekerja ke luar negeri selain Arab Saudi menurut *The Institute for Ecosoc Rights* di Malaysia terdapat sekitar 2 juta TKI hal ini tentunya menimbulkan permasalahan, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimanakah model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di negara malaysia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan perundangan ini sebagai acuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimanakah model penyelesaian hukum terkait perlindungan TKI di negara malaysia.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Konsep Perlindungan TKI yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ayat (1) tersebut dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan Model penyelesaian Hukum terkait Perlindungan TKI di Negara Malaysia Pemerintah Indonesia memberikan Jasa Bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan oleh Pemerintah (Penyelesaian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Mediasi dan Advokasi (menyewa *Lawyer*) untuk membela Kepentingan TKI yang tersangkut masalah Hukum. Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia. Calon Tenaga Kerja Indonesia harus mencari informasi yang akurat terkait prosedur menjadi tenaga kerja yang legal di Malaysia agar jika ada permasalahan pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan yang maksimal.

Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia.

ABSTRACTION

Malaysia is still one of the main destination countries of TKI who will work abroad other than Saudi Arabia according to The Institute for Ecosoc Rights in Malaysia there are about 2 million TKI this is certainly causing problems, how the form of protection of Indonesian Labor law and how the model of legal settlement related protection of migrant workers in malaysia country.

The approach method used in this research is normative juridical. This normative juridical approach method is literature research method that is research on secondary data that is Law Number 39 Year 2004 About Placement and Protection of Indonesian Worker. This legislation as a reference to know the form of legal protection of Indonesian Labor and how the model of legal settlement related to the protection of Indonesian labor migrants in the country of malaysia.

Based on the result of the research and the analysis that has been done, it can be concluded that the concept of TKI's Protection referred to in Law Number 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers paragraph (1) shall be implemented starting from pre-placement, placement period, Completion of Laws relating to the Protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia The Government of Indonesia provides legal assistance services provided by legal aid providers free of charge provided by the Government (This settlement is conducted in two ways: Mediation and Advocacy (hiring Lawyers) to defend the Interests of TKIs involved Legal issues The Government of Indonesia should evaluate the problems faced by Indonesian labor migrants working in Malaysia Candidates for Indonesian Migrant Workers should seek accurate information on legal employment procedures in Malaysia so that if there is a problem of the Indonesian government a can provide maximum protection.

Keywords: Legal Protection, Indonesian Workers.